

POHON KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Sasaran BPKK :

1. Aparatur yang semakin professional
2. Pengelolaan keuangan daerah yang tertib
3. Pengelolaan barang daerah yang optimal
4. Peningkatan pengelolaan pendapatan

Bid. Sekretariat:

1. Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
2. Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
3. Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan.
5. Tercapainya pengelolaan keuangan daerah
6. Tersedianya fasilitas dalam pengelolaan keuangan
7. Tercapainya perencanaan keuangan

Bid. Anggaran:

1. Tersedianya pedoman untuk penyusunan anggaran Kab. Pidie TA 2022
2. Tersedianya Qanun Kab. Pidie tentang APBD TA.2022
3. Tersedianya buku penjabaran APBD Kab. Pidie TA.2022
4. Tersedianya Qanun Kab. Pidie tentang perubahan APBD TA.2022
5. Tersedianya Perbup tentang perubahan penjabaran APBD Kab. Pidie TA.2022
6. Tersedianya DPA-SKPD, DPPA-SKPD sesuai dengan buku penjabaran APBD dan penerbitan SPD.

Bid. Akuntansi:

1. Tersedianya laporan keuangan semesteran
2. Tersedianya buku Qanun pertanggungjawaban APBD TA.2022
3. Tersedianya data penjabaran pertanggungjawaban anggaran Kab. Pidie 2022
4. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dana JKN dan dana BOS
5. Tersedianya laporan keuangan konsolidasi yang valid
6. Tersedianya Perbup tentang penyesuaian Bagan Akuntansi Standar Kab. Pidie Tahun 2019
7. Meningkatnya kualitas SDM pengelola laporan keuangan SKPK
8. Tersedianya sumber daya manusia tentang TP-TGR

Bid. Perbendaharaan:

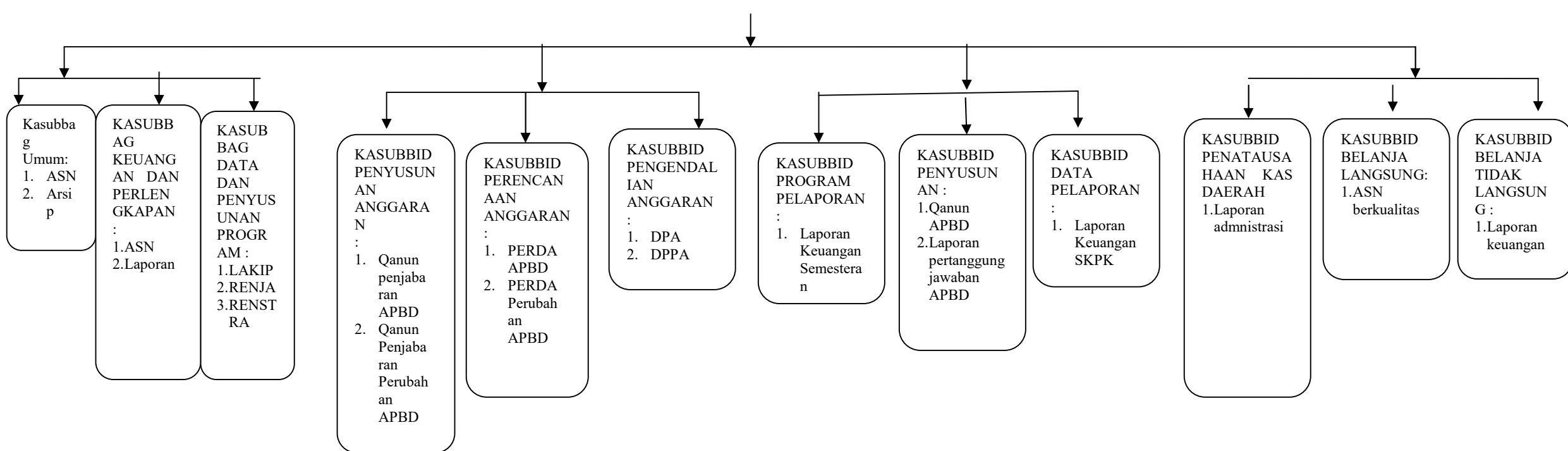
1. Tercapainya pemahaman penggunaan SIM-Gaji
2. Tersedianya laporan Gaji dan Sertifikasi
3. Tersedianya laporan Gaji dan Sertifikasi
4. Tersedianya laporan keuangan pengeluaran dan penerimaan daerah
5. Tercapainya pelayanan penatausahaan administrasi keuangan bagi SKPK

Bid. Pendapatan:

1. Tercapainya target pendapatan daerah
2. Tercapainya target penerimaan pajak daerah
3. Tercapainya target penerimaan PBB dan BPHTB

Bid. Aset:

1. Tersedianya pedoman bagi pelaksanaan anggaran Kab. Pidie
2. Tersedianya buku inventaris unit pengelola barang (UPB) dan jasa pengelolaan aset
3. Tersedianya nilai BMD sebagai dasar penyajian dalam neraca keuangan Kab. Pidie
4. Tersedianya laporan aset Kab. Pidie terkait penambahan/pengurangan aset selama TA.2022
5. Terciptanya pemahaman terhadap pengelolaan barang milik daerah
6. Tercapainya jasa pengelolaan aset/barang milik daerah
7. Terciptanya pemahaman terhadap Permendagri 19/2016 dan terbentuknya Perbup terhadap pengelolaan barang milik daerah
8. Terciptanya pemahaman terhadap pengelolaan barang milik daerah
9. Tersedianya laporan neraca belanja modal dan persediaan



Sambungan.....

